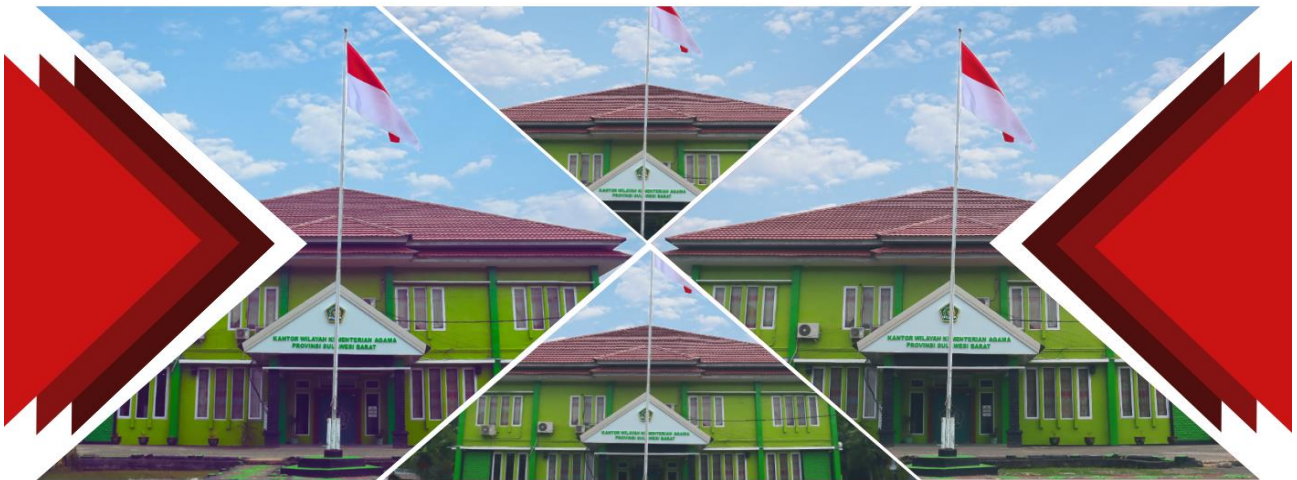




LAPORAN KINERJA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULAWESI BARAT 2024



Tim Organisasi dan Tata Laksana

Jl. H.A.M. Pattana Endeng No. 46, Mamuju, Prov. Sulawesi Barat
Indonesia - 91512



<https://sulbar.kemenag.go.id>



Kanwil Kemenag Sulbar



Kanwil Kemenag Sulbar



kanwilkemenagsulbar

KATA SAMBUTAN

Dr. H. ADNAN NOTA, MA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, segala puji dihaturkan kehadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian kita khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi umat Islam, Salam dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam melakoni kehidupan ini.

Transformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sistem kerja dan pengelolaan kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan target organisasi pemerintah menjadi faktor perubahan di mana seluruh pegawai berkontribusi pada pencapaian tersebut. Laporan kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan demi mendukung program prioritas Kementerian Agama di *Bumi Malaqbi*.

Dalam Kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama , Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan pelaksana atas kerja samanya dalam mendukung segala program dan kegiatan serta prestasi-prestasi yang telah dicapai pada tahun 2024 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Agama.

Akhir kata, kami mengharapkan pada tahun-tahun ke depan, Kantor Wilayah Kementerian Agama akan terus dirasakan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat khususnya di bumi *Malaqbi*, Provinsi Sulawesi Barat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Mamuju, 15 Januari 2025

Kepala Kantor ,


ADNAN NOTA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	9
B. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan misi dan arahan Presiden Joko Widodo di periode keduanya dengan KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden tahun 2019-2024 yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi menjadi agenda pembangunan nasional 2020-2024. Moderasi beragama menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Agama dalam mewujudkan misi dan arahan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan SDM. Dengan beragam dan pengaruh globalisasi dalam interaksi masyarakat Indonesia, moderasi beragama menjadi keniscayaan yang harus menjadi *concern* pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam menetapkan pola komunikasi dan interaksi di antara masyarakat yang beragam agama dan budaya.



Gambar 1.1 Visi-Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Peran Kementerian Agama dalam memberikan solusi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat strategis. Di era disrupsi saat ini, dimana kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik yang menjadi tugas utama instansi pemerintah. Dalam program prioritas Tahun 2024, Kementerian Agama mencanangkan program moderasi beragama sebagai upaya penguatan kebangsaan kehidupan intra maupun antar umat beragama. dalam pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta institusi lain dalam menguatkan kesatuan bangsa agar tidak terpolarisasi yang fokus pada pencapaian tujuan bangsa yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, program penguatan ekonomi keumatan dengan memaksimalkan pemberdayaan zakat, wakaf dan sumber keagamaan lainnya yang telah ditentukan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai *outcome* yang diinginkan harus berkolaborasi dengan institusi pemerintah terkait dan lembaga lain yang terkait yang berfokus pada peningkatan kehidupan umat. Hal ini juga linear dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan secara masif menggerakkan produk halal dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. Selain itu tugas dan fungsi yang selama ini telah dijalankan oleh Kementerian Agama dalam sektor pendidikan, bimbingan masyarakat keagamaan dan penyelenggaraan haji dan umrah merupakan aspek strategis dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pada tahun 2024, dalam menghadapi tantangan yang ada telah menyusun strategi dalam program prioritas dalam Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah dengan Tema : “Transformasi Kementerian Agama Menuju Indonesia Emas 2045” dalam kesempatan itu Para pimpinan Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk lebih melayani umat. Komitmen ini diwujudkan dalam penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kerja, yang bertujuan :

- Mengevaluasi capaian kinerja Kemenag pada tahun 2023
- Meninjau kembali target Kemenag pada tahun 2024
- Merumuskan strategi pelaksanaan program Kemenag pada tahun 2024
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kemenag

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemerintahan dan dalam rangka mewujudkan good governance, maka institusi pemerintah diwajibkan untuk melakukan pelaporan kinerja yang merupakan hasil dari outcome terhadap perencanaan selama 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang di *support* dengan penggunaan keuangan negara, merupakan hal yang wajib dilaksanakan pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintahan.

Disamping itu, sebagai cita-cita dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara berkelas dunia dengan karakter serta budaya kerja yang berintegritas, profesionalitas, menerapkan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabel atau bertanggungjawab dengan berbasis kinerja serta menjadi teladan kepada internal maupun eksternal organisasi, maka diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi institusi yang berdaya saing dengan realisasi perencanaan target yang telah disusun selama tahun 2024 dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dengan berkedudukan di Provinsi Sulawesi Barat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pasal 399 pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.



Gambar 1.2 Program dan Kegiatan Prioritas yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Agama

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:

- koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi serta laporan;
- pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitas asesmen dan pengembangan pegawai;
- penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
- penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
- pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan harmonisasi umat beragama;
- pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Bidang Pendidikan Madrasah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Bidang Pendidikan Madrasah melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional Pendidikan madrasah;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana dan prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, Kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi Pendidikan madrasah;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan;

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Bidang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pendidikan agama Islam pada Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah, Pendidikan madrasah diniyah formaldan diniyah taklimiyah, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan Al-Qur'an, pondok pesantren, dan ma'had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam, dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan Islam;

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan,, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji regular, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
- d. Koordinasi pelayanan di asrama haji; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;

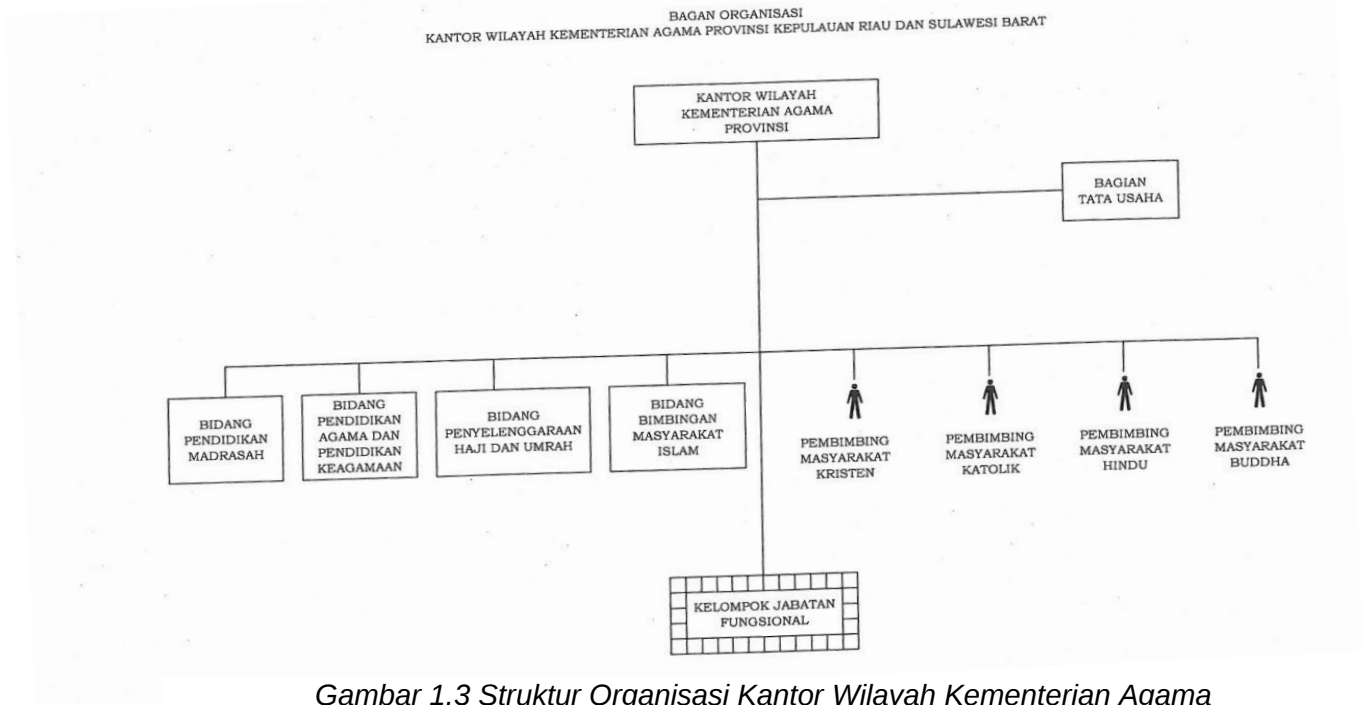
Bidang Bimbingan Masyarakat Islam bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina Syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam;
- c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina Syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga Sakinah, kepenghuluhan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam;

Pembimbing Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana,

serta pelaporan di bidang urusan agama, Pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari, pejabat administrator, pejabat pengawas dan Sub Koordinator;

I. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kepala Kantor Wilayah	Dr. H. Adnan Nota, MA
-----------------------	-----------------------

II. Jabatan Administrator

1. Kepala Bagian Tata Usaha	H. Suharli, S.Ag., M.Pd
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah	Dr. H. Misbahuddin, M.Ag
3. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam	Dr. H. Syamsul, M.Pd
4. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	H. Haerul, S.HI
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	H. Ahmad Barambangy, S.Ag., MA
6. Pembimbing Masyarakat Katolik	Petrus Tandilodang, SS

7. Pembimbing Masyarakat Kristen	Ayub, M.Pd.K
8. Pembimbing Masyarakat Hindu	I Nyoman Aryadi, S.Ag
9. Pembimbing Masyarakat Buddha	TS. Haryanto, S.Ag

4. Aspek Strategis

Sebagai wilayah yang berkembang dengan masyarakat yang memegang tinggi nilai-nilai keagamaan, dan dinamika heterogen kehidupan bermasyarakat maka keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sangat dibutuhkan dalam mengembangkan urusan kehidupan beragama dan Pendidikan keagamaan.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dibutuhkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, berintegritas dan berpikir inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Sebagai instansi vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berfungsi melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di provinsi Sulawesi Barat. Dengan hal tersebut, rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat harus mendukung rencana strategis Kementerian Agama.

1. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Adapun visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang merujuk pada visi Kementerian Agama pada tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

2. Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Dalam mencapai visi tersebut dengan merujuk pada misi Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan misi:

- a. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing pendidikan; dan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Kementerian Agama menetapkan 6 (enam) tujuan dalam rencana strategis tahun 2020-2024. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama tersebut, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
- e. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

4. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 51 sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023.

B. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Adapun perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang telah diperjanjikan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tahun 2023 adalah:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	83	Nilai
		Persentase penyuluh agama yang dibina	95	%
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensinya	100	orang
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	345	Kelompok
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%
		Jumlah aktor kerukunan yang dibina	120	Orang
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1	Desa
	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	1	Lembaga
3.		Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	3	Kegiatan

	perekat persatuan dan kesatuan bangsa			
4.	Membangun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	10	%
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2	Kegiatan
6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	99	%
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	23	%
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	20	%
		Jumlah Imam Besar mesjid yang ditingkatkan mutunya	12	Orang
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	2	Kegiatan/ Konten
9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	94	%
		Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20	%
		Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	85	%
		Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	82	%
		Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	19,6	%

		Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	60	%
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	75	%
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	75	Kegiatan
10.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	100	%
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an	5	%
11.	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	2	Lokasi
12.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, situs, artefak)	3	Lokasi
13.	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll)	10	Event
14.	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	35	KUA
		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	73	Pengelola
15.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	195	Paket
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	2150	Buah
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	27	%
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	12	Layanan
		Jumlah mesjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	500	Lokasi
		Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
16.		Jumlah KUA yang direvitalisasi	20	KUA

	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	KUA
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2000	Orang
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	1500	Anak
		Jumlah penghulu yang dibina	29	Orang
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	630	Keluarga
18.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi	90	%
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	25	%
		Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1	%
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	65	%
		Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	99	%
21.	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	98	%
22.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	98	%
23.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina	100	%
		Persentase lembaga zakat yang dibina	100	%
24.	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	%
		Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	93	%
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	53	%
25.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	%
		Persentase pendidikan diniyah /muadalah yang menerapkan metode	30	%

		pembelajaran inovatif dalam kurikulum		
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	97	%
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	2	Madrasah
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	2	Madrasah
26.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerja sebagai dasar penetapan kinerja	100	%
		Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	50	%
		Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	50	%
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	161	Penghargaan
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	100	%
27.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	50	%
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis e-pembelajaran	21	%
28.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammaseka yang memenuhi SPM sarana prasarana	96	%
		Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65	%
		Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	68	%
		Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	84	%
		Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana	40	%

		Persentase sekolah minggu Buddha/Dhammaseka non formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	76	%
29.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	45373	Siswa
		Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah keagamaan/PDF Muadalah	3570	Siswa
		Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/sekolah keagamaan	47	%
		Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan/PDF Muadalah	15	%
30.	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1	%
		Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	40	%
31.	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammaseka yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	8012	Siswa
32.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase ustads pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	90	%
		Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	16	%
		Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	15	%
		Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	94	%
33.	Terpenuhinya jumlah guru tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	44	%
34.	Meningkatnya kualitas profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru Madrasah yang mengikuti PPG	7	%
		Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	80	%
		Persentase guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1	91	%
		Persentase calon pengawas madrasah/sekolah keagamaan yang menerima beasiswa S2	2	%
35.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	38	Madrasah

36.	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	83	%
		Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%
37.	Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SMAK/ Pesantren/Pasaman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100	%
		Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%
38.	Meningkatnya kepoloporan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina kepoloporan dan kesukarelawanan	120	Organisasi Ekstrakurikuler
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ sekolah keagamaan yang dibina	103	Gugus
39.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	10	%
		Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	kegiatan
40.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	98	%
		Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	100	%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	100	%
		Persentase ASN yang memenuhi syarat levelling kompetensi jabatannya	95	%
		Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	%
		Persentase data ASN yang diupdate	100	%
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	100	%

41.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	118	Dokumen
		Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	%
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	90	%
		Persentase penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Agama	100	%
42.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95	%
		Persentase tanah yang bersertifikat	95	%
		Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN	85	%
43.	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	85	%
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	85	%
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	%
44.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	80	%
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	5	Satuan Kerja
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	5	Orang
45.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data	99	%
		Persentase keselarasan muatan renja dan renstra	88	%
		Persentase perencanaan kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%
46.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%
		Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	90	%
47.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85	%

48.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	90	%
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	95	%
		Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	95	%
49.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	85	%
50.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90	%
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	95	%
51.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	85	%
		Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	90	%

No	Program	Anggaran (dalam ribu)	
A.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	46.076.141.000
1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp.	1.250.000.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp.	3.202.440.000
3.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	Rp.	197.300.000
4.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Rp.	222.000.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Rp.	363.320.000
6.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Rp.	200.456.000
7.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	Rp.	327.758.000
8.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	Rp.	20.000.000
9.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	Rp.	230.041.000
10.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp.	1.557.703.000
11.	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Rp.	33.725.000
12.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp.	105.284.000
13.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp.	16.726.621.000
14.	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Rp.	124.620.000
15.	Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp.	214.797.000

	16. Pembinaan Administrasi Umum	Rp.	10.865.158.000
	17. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Rp.	92.568.000
	18. Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp.	10.342.391.000
B.	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp.	11.723.811.000
	1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp.	517.270.000
	2. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga sakinah	Rp.	6.036.909.000
	3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp.	522.000.000
	4. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp.	899.800.000
	5. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp.	620.000.000
	6. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Rp.	535.000.000
	7. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Rp.	858.880.000
	8. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Rp.	1.092.640.000
	9. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	Rp.	181.550.000
	10. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp.	30.240.000
	11. Pelayanan Haji dalam Negeri	Rp.	89.120.000
	12. Pembinaan Haji	Rp.	340.402.000
C.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp.	14.423.906.000
	1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	Rp.	720.722.000
	2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rp.	12.183.439.000
	3. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	Rp.	361.590.000
	4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	Rp.	327.500.000
	5. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	Rp.	197.000.000
	6. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	Rp.	260.035.000
	7. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	Rp.	339.620.000
	8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	Rp.	34.000.000
D.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp.	20.837.490.000
	1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp.	20.116.755.000
	2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Rp.	366.050.000

3.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Rp.	113.185.000
4.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Rp.	62.800.000
5.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	Rp.	39.000.000
Jumlah Keseluruhan		Rp.	93.061.348.000

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam menjawab tantangan dan menggapai cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi melakukan transformasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain perubahan di sektor hulu pada evaluasi dengan berdasarkan pelaksanaan perubahan di beberapa sektor dalam internal Instansi Pemerintah, tetapi mengubah pada perubahan yang berdampak dengan Reformasi Tematik di hilir. Adapun fokus reformasi birokrasi berdampak adalah Tahun 2024 (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting; (3) Peningkatan Investasi; dan (4) Pelaksanaan Prioritas Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Pemerintah dan Pengendalian Inflasi). Berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, maka capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
1.	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	83	Nilai	95	Nilai	118.75%
		Persentase penyuluh agama yang dibina	95	%	100	%	109.89%
		Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensinya	100	orang	100	orang	100%
		Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	345	Kelompok	250	Kelompok	72.89%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	111.11%
		Jumlah aktor kerukunan yang dibina	120	Orang	130	Orang	108.33%
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1	Desa	1	Desa	100%
3.	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	1	Lembaga	3	Lembaga	120%
		Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%

4.	Membangun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%	100	%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	10	%	15	%	120%
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%
6.	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	99	%	100	%	103.09%
7.	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	22	%	22	%	100%
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	20	%	20	%	100%
		Jumlah Imam Besar mesjid yang ditingkatkan mutunya	12	Orang	60	Orang	120%
		Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	1	Lokasi	6	Lokasi	120%
8.	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	2	Kegiatan	4	Kegiatan	120%
9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80	%	100	%	120%
		Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	94	%	100	%	106.38%
		Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	88	%	20	%	22.73%
		Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	20	%	40	%	120%
		Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	83	%	90	%	108.43%

		Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	82	%	82	%	100%
		Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	9.8	%	90	%	120%
		Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	58	%	58	%	100%
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	65	%	65	%	100%
		Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	15	Kegiatan	65	Kegiatan	120%
10.	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	90	%	100	%	111.11%
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an	3	%	3	%	100%
11.	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	2	Lokasi	2	Lokasi	100%
12.	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (wisata religi, situs, artefak)	3	Lokasi	3	Lokasi	100%
13.	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll)	12	Event	12	Event	100%
14.	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	30	KUA	30	KUA	100%

		Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	80	Penge- lola	80	Penge- lola	100%
15.	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	192	Paket	192	Paket	100%
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	1930	Buah	930	Buah	48.19%
		Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	27	%	27	%	100%
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	12	Layanan	12	Layanan	100%
		Jumlah mesjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	500	Lokasi	500	Lokasi	100%
		Jumlah SDM Falakiyah yang dibina	19	Orang	19	Orang	100%
		Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	Jumlah KUA yang direvitalisasi	20	KUA	20	KUA	100%
		Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	KUA	6	KUA	120%
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2000	Orang	13326	Orang	120%
		Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	1500	Anak	9250	Anak	120%
		Jumlah penghulu yang dibina	25	Orang	32	Orang	120%
17.	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/suk inah/hitta sukhaya	550	Keluarga	291	Keluarga	52.91%
18.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Persentase penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi	90	%	100	%	111.11%

	ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus						
19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	25	%	30	%	120%
		Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1	%	0	%	100%
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	55	%	100	%	120%
		Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	99	%	100	%	120%
21.	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	98	%	98	%	100%
22.	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)	98	%	100	%	102%
23.	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang dibina	75	%	75	%	100%
		Persentase lembaga zakat yang dibina	100	%	100	%	100%
24.	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	89	%	100	%	112.36%
		Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	89	%	100	%	112.36%
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	49	%	49	%	100%
25.	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	90	%	75	%	83.42%
		Persentase pendidikan diniyah /muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	20	%	20	%	100%
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	97	%	90	%	92.78%

		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	2	Mad-rasah	17	Mad-rasah	120%
		Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	2	Mad-rasah	2	Mad-rasah	100%
26.	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerja sebagai dasar penetapan kinerja	100	%	100	%	100%
		Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	37	%	37	%	100%
		Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan kinerja	45	%	40	%	85.11%
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	117	Peng-hargaan	115	Peng-hargaan	98.29%
		Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	93	%	100	%	100%
27.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	40	%	40	%	100%
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis e-pembelajaran	21	%	50	%	120%
28.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammaseka yang memenuhi SPM sarana prasarana	93	%	93	%	100%
		Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	51	%	51	%	100%

		Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madaya Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	57	%	57	%	100%
		Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	77	%	77	%	100%
		Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren yang memenuhi SPM sarana prasarana	10	%	10	%	100%
		Persentase sekolah minggu Buddha/Dhammaseka non formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%	100	%	120%
29.	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	43010	Siswa	41038	Siswa	95.42%
		Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah keagamaan/PDF Muadalah	2970	Siswa	3980	Siswa	120%
		Persentase siswa penerima PIP pada madrasah/sekolah keagamaan	47	%	45.47	%	96.74%
		Persentase siswa penerima PIP pada pendidikan keagamaan/PDF Muadalah	10	%	69	%	120%
30.	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	1	%	1	%	100%
		Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	35	%	21	%	60%
31.	Menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammaseka yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	7632	Siswa	6736	Siswa	88.26%
32.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase ustads pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	80	%	0	%	0%
		Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	15	%	15	%	100%

		Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang memperoleh peningkatan kompetensi	15	%	15	%	100%
		Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	93	%	80	%	86.02%
33.	Terpenuhinya jumlah guru tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	36	%	98	%	120%
34.	Meningkatnya kualitas profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase guru Madrasah yang mengikuti PPG	6	%	1.2	%	20%
		Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	50	%	50	%	100%
		Persentase guru pendidikan agama berkualifikasi minimal S1	87	%	87	%	100%
		Persentase calon pengawas madrasah/sekolah keagamaan yang menerima beasiswa S2	1	%	1	%	100%
35.	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadallah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	32	Mad-rasah	50	Mad-rasah	120%
36.	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	75	%	95	%	120%
		Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%	1	%	100%
37.	Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan	Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/SM AK/ Pesantren/Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90	%	100	%	111.11%

	dan bebas dari kekerasan	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	90	%	100	%	111.11%
		Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%	100	%	100%
38.	Meningkatnya kepoloporan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/pendidikan keagamaan yang dibina kepoloporan dan kesukarelawanan	90	Organisasi ekstrakurikuler	90	Organisasi Ekstrakurikuler	100%
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	60	%	60	%	100%
39.	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	%	100	%	100%
		Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	kegiatan	1	kegiatan	100%
40.	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	96	%	96	%	100%
		Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	100	%	100	%	100%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	100	%	100	%	100%
		Persentase ASN yang memenuhi syarat levelling kompetensi jabatannya	95	%	76	%	80%
		Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	%	90	%	100%
		Persentase data ASN yang diupdate	100	%	100	%	100%
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	100	%	100	%	100%
41.	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai	Jumlah laporan keuangan semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	118	Dokumen	118	Dokumen	100%

	dengan ketentuan	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	%	100	%	100%
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	90	%	101.1	%	112.33%
		Persentase penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Agama	100	%	100	%	100%
42.	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95	%	95	%	100%
		Persentase tanah yang bersertifikat	95	%	100	%	105.26
		Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN	85	%	85	%	100%
43.	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75	%	75	%	100%
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	82	%	82	%	100%
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95	%	80	%	84.21%
44.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	76	%	76	%	100%
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	5	Satuan Kerja	5	Satuan Kerja	100%
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	4	Orang	4	Orang	100%
45.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data	98	%	98	%	100%
		Persentase keselarasan muatan renja dan renstra	86	%	92	%	102.22%
		Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100%

46.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%	92	%	102.22%
		Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	90	%	90	%	100%
47.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	84	%	84	%	100%
48.	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti seara tepat waktu	90	%	100	%	111.11%
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	95	%	70	%	73.68%
		Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	95	%	95	%	100%
49.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	83	%	90	%	108.43%
50.	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90	%	90	%	100%
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	95	%	100	%	105.26%
51.	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	83	%	83	%	100%
		Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	90	%	90	%	100%

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2024

Berdasarkan hasil capaian organisasi dari hasil yang tertera pada tabel 3.1 diatas bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mendapat Predikat Istimewa dengan capaian kinerja organisasi 100.27%. Adapun capaian kinerja organisasi selama tahun rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan upaya perbaikan yang senantiasa dilakukan berdasarkan

evaluasi hasil dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja organisasi dari Rencana strategis yang di *breakdown* per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah:

Pelaksanaan Kinerja Organisasi	2020	2021	2022	2023	2024	Ket.
2	3	4	5	6	7	8
Capaian Kinerja Organisasi Tahunan	N/A	92.31% (Baik)	95.24% (Baik)	100.53% (Istimewa)	100,27% (Sangat baik)	

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama per Tahun dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak yang menekankan pada 4 (empat) fokus pelaksanaannya khususnya dalam melakukan penanggulangan kemiskinan dan upaya dalam menurunkan stunting khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

a. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial agar masyarakat yang mengalami masalah sosial tetap terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan mendapatkan layanan dan akses dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Program Indonesia Pintar (PIP)

Kementerian Agama RI sesuai dengan tugas dan kewenangannya salah satunya adalah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan ke sekolah, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antar penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.



Gambar 3.1 Proses pelaksanaan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu Madrasah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Dengan amanat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pendidikan Madrasah di tahun 2024 menyalurkan anggaran dengan jumlah Rp. 8.434.950.000,- (*Delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada 16.549 dari 19.797 (83.59%) siswa-siswa madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun jumlah siswa penerima PIP berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kabupaten	Jenjang Pendidikan Madrasah			Jumlah
		Ibtidaiyah	Tsanawiyah	Aliyah	
1	2	3	4	5	6
1	Majene	1.234	1.852	788	3.878
2	Mamasa	265	56	104	425
3	Mamuju	683	1.318	634	2.635
4	Mamuju Tengah	258	573	520	1.351
5	Pasangkayu	378	526	161	1.065
6	Polewali Mandar	4.379	4.079	1.959	10.417
Jumlah		7.197	8.404	4.166	19.771

Tabel 3.3 Jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pendidikan Madrasah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Gambar 3.1 Siswa penerima Program Indonesia Pintar pada Madrasah Tsanawiyah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pendidikan Keagamaan di tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan kepada 1.366 santri yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sebaran penerima PIP pada pendidikan keagamaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten	Jenjang Pendidikan Madrasah			Jumlah
		Ula	Wustha	Ulya	
1	2	3	4	5	6
1	Majene	5	95	0	100
2	Mamuju	0	116	53	169
3	Mamuju Tengah	22	61	51	134
4	Polewali Mandar	224	1.525	611	2.360
Jumlah		251	1.797	715	2.763

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama per Tahun dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Program kampung zakat merupakan wujud inovasi kebijakan yang lebih berbasis pencapaian *output* dan *outcome*. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan hasilnya langsung dirasakan oleh penerima. Sementara pendekatan agama diambil karena posisi agama secara inheren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Program ini merupakan wujud kehadiran negara dalam berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Kampung Zakat merupakan kegiatan Kementerian Agama RI bersama-sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Kementerian Agama dalam hal ini adalah koordinator, inisiator kampung zakat dan didukung oleh eksekutor dan fasilitator program pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, yaitu BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Aspek sinergitas antara lembaga seperti Baznas dan Lembaga Amil Zakat yang di koordinir oleh Kementerian Agama diharapkan bisa menjadi gerakan baru dalam mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Program kampung Zakat Provinsi Sulawesi Barat telah terbentuk di setiap kabupaten. Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah merupakan Kampung zakat pertama yang di *Launching* pada tanggal 14 Desember tahun 2021 oleh Direktur Pemberdayaan zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Melihat kesuksesan beberapa lokasi kampung Zakat di berbagai provinsi, Bapak Menteri Agama meminta Dirjen Bimas Islam untuk membentuk kampung Zakat di setiap Kabupaten kota. Pada pertengahan tahun 2022 Kementerian Agama telah meresmikan 422 lokasi kampung Zakat di seluruh Indonesia termasuk 5 Lokasi kampung Zakat di provinsi Sulawesi Barat.

Untuk pendanaan program kampung Zakat Pemerintah pusat telah bekerja keras membangun kemitraan dengan pemerintah Daerah, Baznas RI dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Salah Satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memberikan Kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan kampung Zakat adalah LAZIS ASSALAM FIL ALAMIN. Lembaga Amil Zakat Nasional Assalam Fil Alamin merupakan salah satu lembaga filantropi yang secara *continue* berfikir keras untuk ikut menyelesaikan problematika umat, melalui pendayagunaan dan tasarruf zakat yang tepat sasaran. Lazis Assalam

Fil Alamin (ASFA) yang didirikan oleh Komjen Pol (Purn) Dr. Syafruddin dan diketuai oleh Dr. KH. Dasat Latief, M.Si., Ph.D, didedikasikan untuk program keumatan melalui tasarruf zakat dalam bentuk 5 program: Pendidikan, Ekonomi, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial dan Dakwah. LAZIS ASFA juga telah banyak memberikan kontribusi pada Program pemberdayaan Kampung Zakat melalui penyaluran/ Tasarruf Dana Zakat di berbagai provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2022 Lazis Assalam fil Alamin telah mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar Rp 200.000.000 pada dua Lokasi Kampung Zakat di provinsi Sulawesi Barat yaitu Kampung Zakat Desa kambunong sebesar Rp100.000.000,- dan Kampung Zakat Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo Kabupaten Mamuju Tengah.

Selanjutnya pada awal Tahun 2023 Lazis Assalam Fil Alamin kembali menyalurkan Dana Zakat Infaq dan Sedekah untuk Kampung Zakat Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu juga melakukan Tasarruf Zakat berupa Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji, Penyuluh Agama Non PNS, Pemberian Paket Sembako, Bantuan Beasiswa, Bantuan Pemberdayaan UMKM, dan Bantuan Program Kampung Zakat. Adapun Rincian penyaluran bantuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Bantuan Program Kampung Zakat	4 Lks	Rp. 100.000.000	Rp. 400.000.000
2.	Bantuan Program UMKM di Kabupaten Majene	20 Lks	Rp. 5.000.000	Rp. 100.000.000
3.	Bantuan Guru Ngaji, Ustadz TPQ, Guru Madrasah Honorer, Imam Masjid dan Ta'mir Masjid	500 Orang	Rp. 300.000	Rp. 150.000.000
4.	Bantuan Beasiswa Berprestasi	10 Orang	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000.000
5.	Bantuan Penyuluh Agama Islam Non PNS	67 Orang	Rp. 300.000	Rp. 20.100.000
6.	Pembagian Paket sembako	1000 Paket	Rp. 200.000	Rp. 200.000.000

Tabel 3.5 Daftar alokasi penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan Pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Kampung Zakat di 6 Lokasi yang telah diserahkan Dana Bantuan Kampung Zakat untuk 6 Kabupaten

yang mendapatkan bantuan APBN. Kampung Zakat yang menerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi dari APBN adalah sebagai Berikut:

1. Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar
2. Desa Salu Aho, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa
3. Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu

b. Penurunan Stunting

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting yang masih tinggi membuat penanganan stunting di Sulawesi Barat menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8% dan pada tahun 2022 prevalensi stunting naik menjadi 35,0%. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting target menurunkan pravelensi stunting harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Adapun pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi (1) remaja; (2) calon pengantin; (3) ibu hamil; (4) ibu menyusui; dan (5) anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

B. Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 98.103.031.000. Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 94.661.061.052 dengan capaian realisasi 96.49 %. Gambaran anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja dan alokasi serta realisasi per unit kerja dapat dilihat pada tabel dibawah:

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
1.	PEGAWAI	Rp. 47.131.574.000	Rp. 43.967.316.383	93,29%
2.	BARANG	Rp. 21.662.896.000	Rp. 21.415.537.078	98,86%
3.	MODAL	Rp. 29.191.561.000	Rp. 29.161.207.585	99,90%
4.	BANTUAN SOSIAL	Rp. 117.000.000	Rp. 117.000.000	100%
JUMLAH		Rp. 98.103.031.000	Rp. 94.661.061.046	96,49%

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi
1.	664770-Sekretariat	Rp. 40.212.235.000	Rp. 37.195.970.965	92,50%
2.	664771-Bimas Islam	Rp. 8.079.164.000	Rp. 8.006.084.913	99,10%
3.	664772-Pend. Islam	Rp. 42.436.003.000	Rp. 42.109.811.237	99,23%
4.	664773-Bimas Kristen	Rp. 1.346.750.000	Rp. 1.334.719.206	99,11%
5.	664774-Bimas Katolik	Rp. 1.660.596.000	Rp. 1.655.337.328	99,68%
6.	664775-Bimas Hindu	Rp. 1.856.268.000	Rp. 1.855.649.980	99,97%
7.	664776-Bimas Buddha	Rp. 494.550.000	Rp. 494.524.315	99,99%
8.	664777-Peny. Haji dan Umrah	Rp. 2.017.465.000	Rp. 2.008.963.102	99,58%
JUMLAH		Rp. 98.103.031.000	Rp. 94.661.061.046	96,49%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100.37% dengan predikail SANGAT BAIK dan realisasi anggaran sebesar 96,49%. Namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang. Hasil tersebut juga harus dipertahankan atau ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Dengan tantangan di era distrupsi saat ini, dibutuhkan kinerja yang *out of the box* dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat harus mengetahui sasaran kegiatan dan target yang telah ditetapkan dan memberikan inovasi dan kreatifitas dalam menunjang pencapaian tersebut. Strategi penyerapan anggaran juga menjadi perhatian penting yang harus dilaksanakan agar pemanfaatan anggaran yang telah diamanatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukan dalam mendukung pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan. Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja juga harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi serta menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder yang dapat mendukung pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Demikian Laporan Kinerja (LKj) atau yang dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

LAMPIRAN